

ADVOKASI KEBIJAKAN TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PARTAI AMANAT NASIONAL DI KABUPATEN LANGKAT

Shalsha Khairunnisa¹⁾, Rudi Salam Sinaga²⁾, Khairunnisah Lubis³⁾

1) Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Email Korespondensi: shalshakhairunnisa12@gmail.com

Email: rudisalam@staff.uma.ac.id; khairunnisah@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

Community political education programs are carried out PAN through recess and masa bimbingan anggota "Policy Advocacy for Community Political Education Through Programs Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat aims to make it easier Partai Amanat Nasional in carrying out activities and listening to community inspiration Langkat the problem in research is how to program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat in conducting policy advocacy for public political education, what are the determinants of policy success and program inhibiting factors Partai Amanat Nasional in policy advocacy for community political education. Public Education Advocacy Policy has received support from the Government for Political Parties. Policy Partai Amanat Nasional Success factors, commitment, awareness, inhibiting factors, implementation time, area size, funds or money, national political situation, human resources, relations between administrators

Keywords: Political Education, Policy Advocacy, National Mandate Party Program.

ABSTRAK

Program pendidikan politik masyarakat dilakukan PAN melalui reses dan mabita "Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat", bertujuan untuk mempermudah PAN dalam melaksanakan kegiatan serta mendengarkan inspirasi masyarakat Langkat. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat, bagaimana faktor penentu keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat Program Partai Amanat Nasional dalam advokasi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi, yaitu melakukan penelitian dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dan masyarakat. Kebijakan Advokasi Pendidikan masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah kepada Partai Politik. Kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Advokasi Pendidikan Politik terdapat faktor keberhasilan dan penghambat. Faktor keberhasilan adanya komitmen, adanya kesadaran, faktor penghambat, waktu pelaksanaan, luas wilayah, dana atau uang, situasi politik nasional, Sumber Daya Manusia, relasi antar pengurus.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Advokasi Kebijakan, Program Partai Amanat Nasional.

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai serana pendidikan politik dan wadah pengkaderan politik yang mana nantinya kader-kader ini akan ikut serta dalam pemilihan di suatu daerah, dengan ikut serta dalam pendidikan politik, masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

politiknya sebagai warga Negara Indonesia. Partai politik harus menjalankan fungsi dan peran penting dalam serana pendidikan politik, sosialisasi politik sebagai wadah aspirasi dan partisipasi bagi masyarakat. Pendidikan politik ini tidak akan lepas dari keberlangsungan hidup seseorang masyarakat di dalam sebuah aktivitasnya, serta memperluas pemahaman masyarakat, meningkatkan kualitas politik rakyat menuju peran aktif dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Tabel: 1. Perbandingan Presentase Partisipasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Langkat Pada Tahun 2014 Dan 2018.

NO	Pemilu/Pilkada	Tahun	Presentase Pemilih
1	Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat	2014	75,11 %
2	Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat	2018	73,24 %

Sumber: KPU Langkat

Kesadaran masyarakatnya dalam berpolitik, serta melihat bagaimana demokrasi daerah tersebut dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif, partisipasi masyarakat dalam pemilihan di Kabupaten Langkat dengan indeks presentase sedang. Jika dilihat dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilih ialah mereka yang mengagap pemilihan tidak begitu penting, sehingga banyak dari mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti menangkap ikan dilaut, berladang, dan lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam menggunakan hak pilih di pilkada, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, tanggung jawab dari pihak partai politik, badan pengawas pemilu (BAWASLU), Komisi pemilihan umum (KPU), Pemerintah Kabupaten Langkat.

Partai Politik Amanat Nasional berupaya melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Kabupaten Langkat dengan program partai : Masa bimbingan anggota, kegiatan sosial dan sosialisasi partai, dan melakukan reses bersama DPRD Kabupaten Langkat Partai Amanat Nasional. Dalam melakukan program tersebut Partai Amanat Nasional Mendapatkan hambatan transformasi pendidikan politik sehingga pendidikan politik tidak bisa di lakukan secara optimal. Hambatan yang di dapat Partai Amnata Nasional dalam melakukan pendidikan politik yaitu : Masyarakat tidak mengetahui perannya sebagai pengguna hak dan kewajiban, kurangnya kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi di politik, menganggap politik itu tidak terlalu penting. Tulisan ini akan menjawab bagaimana advoksi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat melalui program partai amanat nasional kabupaten langkat.

METODE

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fakta yang apa adanya lalu hasilnya diolah menjadi data. Dimana penulis mencobak untuk mengelolah data yang diperoleh dari Kebijakan Partai Amanat Nasional terhadap advokasi pendidikan politik masyarakat Kabupaten Langkat. Penelitian kualitatif metode yang paling efektif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dikarenakan metode kualitatif merupakan metode yang melakukan pengamatan secara mendalam serta mendetail dengan semua sumber data yang ditemukan, sehingga

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

dapat sangat membantu jalannya penelitian ini. Penelitian ini menentukan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya informan yang ditunjuk ialah yang paling memahami tentang permasalahan yang ada pada penelitian. Informan penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Informan Kunci, Informan Utama, Informan Tambahan.

PEMBAHASAN

Tabel: 2. Program Kerja Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2021-2024

No	Nama Partai	Tingkat	Jumlah peserta	Tema Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1	Partai Amanat Nasional Kab. Langkat	Kabupaten	50 orang	Pelatihan Kepemimpinan	Kegiatan Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) sebagai salah satu persiapan menghadapi pemilu 2024 serta melatih kader untuk semakin kuat dan berkompeten
2	Partai Amanat Nasional Kab. Langkat	Kabupaten	50 Orang	Pendidikan politik	Bimbingan Teknis E-SAKSI dan E-KTA yang di buat secara online agar maksimal dan lebih siap menghadapi pemilu 2024
3	Partai Amanat Nasional Kab. Langkat Bersama DPRD Langkat	Kabupaten	50 Orang	Reses Bersama DPRD	Mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan keluh kesah masyarakat baik di dalam bidang perekonomian sosial dll
4	Partai Amanat Nasional Kab. Langkat	Kabupaten	50 Orang	MABITA (Masa Bimbingan Anggota)	Membimbing Kader amanat Dasar, Kader Amanat madian untuk memperkenalkan partai politik, Apa itu PAN, Tujuan partai politik dll

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Kebijakan Partai Amanat Nasional Terhadap Advokasi Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Langkat

Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu partai politik yang memiliki hak dan wewenang dalam melakukan kebijakan advokasi pendidikan politik terhadap masyarakat. Advokasi kebijakan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga partai politik dengan mudah mencapai tujuan yang telah di tentukan dalam pendidikan politik khususnya. Menurut Valerie Miller dan Jane Covey (2005) bahwa advokasi merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh kelompok orang, dimana mereka memiliki akses yang terbatas terhadap kekuasaan. Valerie Miller dan Jane Covey membagi beberapa faktor penting yang harus di miliki untuk melaksanakan advokasi kebijakan yaitu : Legitimasi, Kredibilitas, Pertanggung Jawaban, dan Kekuasaan.

a. Legitimasi

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas mengenai legitimasi, atau pengakuan masyarakat pada Partai Amanat Nasional dalam advokasi kebijakan pendidikan politik terhadap masyarakat. Dimana peneliti dapat menyimpulkan bahwa didalam advokasi kebijakan pendidikan politik kepada masyarakat Partai Politik Amanat Nasional telah berupaya memberikan pendidikan politik dimana adanya kegiatan yang dilakukan oleh partai politik bersama kader DPRD Kabupaten Langkat Partai Amanat Nasional, kepada masyarakat dalam kegiatan itu masyarakat menyabut dengan baik apa yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini peneliti mencobak memberi masukkan yaitu sebagai partai politik yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pendidikan politik untuk masyarakat maka dalam advokasi kebijakan pendidikan politik seharusnya Partai Politik Amanat Nasional memiliki motifasi yang sama, sehingga apa yang diinginkan oleh partai bisa tercapai.

b. Kredibilitas

Berdasarkan hasil yang saya dapat di lapangan tentang advokasi kradibilitas kebijakan Partai Amanat Nasional dalam pendidikan politik masyarakat, dapat peneliti simpulkan bahwa partai amanat nasional dalam hal ini masih belum mampu membuat masyarakat untuk percaya sepenuhnya terhadap partai, karena ketua partai dan kader-kader partai politik masih belum mampu meyakinkan masyarakat, terhadap tujuan partai politik serta bagaimana berpolitik itu dengan baik. Seharusnya ketua partai dan kader-kader Partai Amanat Nasional, harus memberikan suatu bukti nyata kepada masyarakat bagaimana kader Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Langkat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat baik dalam pendidikan politik maupun ekonomi, apa yang di lakukan oleh Partai Amanat Nasional harus di perhatikan kepada masyarakat.

c. Pertanggung Jawaban

Dari hasil penelitian yang dapat di lapangan tentang pertanggung jawaban kebijakan Partai Amanat Nasional terhadap pendidikan politik masyarakat telah dilakukan dengan baik dimana ada bukti yang di tunjukan oleh ketua partai, kader, serta sekretaris partai tetapi, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban kebijakan yang di lakukan belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat dimana Partai Aamanat Nasional memfokuskan pendidikan politik itu kepada masyarakat yang ingin menjadi kader partai politik, sehingga masyarakat luar yang tidak ikut serta dalam kader tidak dapat merasakan pendidikan politik. Seharusnya Partai Amanat Nasional tidak hanya memfokuskan pendidikan politik itu kepada kadernya, tetapi memberikan pendidikan politik juga pada masyarakat, pada masa sosialisasi partai politik.

d. Kekuasaan

Berdasarkan hasil yang peneliti dapat di lapangan terhadap kekusaan yang dimiliki partai PAN, dalam advokasi kebijakan pendidikan politik masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwasanya Partai Amanat Nasional sebagai partai politik telah di berikan amanat dari undang-undang serta pemerintah untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, akan tetapi pada pelaksanaan pendidikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

tersebut terjadi ketidak seimbangan antara pengurus partai atau ketua dengan kader-kader Partai Amanat Nasional itu sendiri sehingga pendidikan politik terhadap masyarakat itu tidak berjalan dengan mestinya. Seharusnya Partai Amanat Nasional harus membuat suatu trobosan kepengurusan partai yang khusus melakukan pendidikan politi kepada masyarakat, karena Partai Amanat Nasional telah diberikan hak dan kewajiban serta dana keuangan dari pemerintah untuk melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Faktor Keberhasilan Serta Faktor Penghambat Kebijakan Partai Amanat Nasional Dalam Advokasi Pendidikan Politik

Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan merupakan suatu tindakan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsi manajemennya dengan terampil di dalam suatu bidangnya sesuai dengan mekanisme suatu tujuan yang ada di dalam organisasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Partai Amanat Nasional dalam melakukan kebijakan advokasi pendidikan politik di masyarakat kabupaten langkat yaitu :

a. Adanya Komitmen

Komitmen dari pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu adanya kesepakatan bersama pengurus Partai Amanat Nasional dalam menjalankan salah satu fungsi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik terhadap kader-kadernya yang diyakini memiliki dampak baik terhadap pemahaman kader tentang tujuan berpolitik. Adapun maksud lain yang ingin dicapai yaitu para pengurus dapat mendekatkan diri terhadap kader-kadernya yang tersebar di Kabupaten Langkat maupun masyarakat Kabupaten Langkat. Dengan melakukan pendekatan kepada kader-kader partai politik supaya dapat menyampaikan kepada kader-kader Partai Amanat Nasional untuk memberikan ilmu pengetahuan yang di dapatkan selama dalam pengkaderan, kepada masyarakat tentang berpolitik serta hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik.

b. Adanya Kesadaran

Kesadaran dan keaktifan kader Partai Amanat Nasional yaitu selama adanya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat sebagian besar adanya keterlibatan kader-kader partai yang bukan saja ikut terlibat saat kegiatan berlangsung, namun terlihat adanya antusias dari kader dalam melakukan konsolidasi terhadap sesama kader maupun terhadap masyarakat dalam mengikuti suatu kegiatan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu faktor yang menyebabkan sebuah organisasi itu tidak dapat melakukan kegiatan yang di inginkan dengan lancar, faktor penghambat yang mempengaruhi Partai Amanat Nasional dalam melakukan kebijakan advokasi pendidikan politik terhadap masyarakat kabupaten langkat yaitu:

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya pendidikan politik ini dimana setiap masyarakat pasti memiliki kesibukan masing-masing, ketika Partai Amanat Nasional melakukan pendidikan politik sehingga masyarakat ada yang ikut dan yang tidak ikut dalam pendidikan politik.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pendidikan yang di lakukan oleh Paratai Amanat Nasional yang di lakukan di Kabupaten Langkat, wilayah yang cukup luas serta alat trasfortasi yang tidak mendukung untuk mencapai wilayah-wilayah tertentu. Dimana Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan, 240 Desa, 27 Kelurahan tentunya sangat menghambat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat.

c. Dana atau Uang

Supaya pendidikan politik berjalan dengan lancar Partai Amanat Nasional perlu mengeluarkan dana yang cukup besar, dimana dana atau uang tersebut di gunakan untuk fasilitas pelaksanaan pendidikan politik. Sedangkan dana yang di dapatkan Partai Amanat Nasional dari pemerintah tidak cukup untuk mencapai keseluruhan wilayah Kabupaten Langkat yang begitu luas.

d. Situasi Politik Nasional

Situasi politik nasional yang dimaksud tersebut adalah pengaruh terhadap susunan politik nasional yang berdampak sampai ke tingkat daerah seperti yang ditemukan oleh pengurus partai Partai Amanat Nasional bahwa kehadiran kader maupun masyarakat dalam pelaksanaan terkadang sangat minim. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai bahwa partai Partai Amanat Nasional merupakan partai yang berpihak, dan dalam perjuangannya hanya mementingkan golongan tertentu.

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud pada hal tersebut adalah pemahaman kader ataupun masyarakat terhadap politik yang begitu minim sehingga mereka beranggapan bahwa pendidikan politik itu tidak bermanfaat lantas hal tersebut berdampak pada tingkat kehadiran saat kegiatan berlangsung. Begitu juga dengan motivasi mengikuti kegiatan tersebut didasarkan pada sesuatu yang bersifat semu yakni adanya uang duduk atau uang transportasi.

f. Relasi Antar Pengurus

Relasi antar pengurus yang dimaksud dalam hal ini yakni hubungan antara pengurus yang satu dengan lainnya tidak terjalin begitu erat sehingga terkadang menimbulkan kesalah pahaman antar pengurus, hal ini diyakini dapat menyebabkan target pelaksanaan pendidikan politik yang telah direncanakan kadang gagal.

KESIMPULAN

Program Kerja Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat, suatu proses yang dilakukan Partai untuk melaksanakan kegiatan partai dalam melakukan pendidikan politik, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengetahui hak dan kewajiban dalam pemilihan. Berdasarkan teori advokasi Kebijakan Valerie Miller dan Jane Covey (2005) yang saya gunakan, yaitu: Pada indikator kekuasaan yang di miliki Partai Amanat Nasional dalam melaksanakan program kerja pendidikan politik masyarakat dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, reses bersama DPRD, dan Mabita "Masa Bimbingan Anggota" telah dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional sesuai prosedur kegiatan yang dibuat partai. Kekuasaan yang dimiliki partai mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program kerja sesuai prosedur yang telah dituliskan. Pada indikator legitimasi atau pengakuan masyarakat Partai Amanat Nasional melaksanakan kegiatan program kerja, dimana program kerja yang dilakukan Partai Amanat Nasional yang meliputi pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik dengan membuat E-KTA, reses bersama DPRD, serta melaksanakan MABITA (masa bimbingan anggota) merupakan suatu bentuk kewajiban partai politik terhadap masyarakat. Pada indikator kredibilitas Partai Amanat Nasional mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja partai, dimana kegiatan tersebut mendapat dana atau uang dari pemerintah daerah, serta berjalanya kegiatan tersebut dengan lancar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap partai. Pada indikator pertanggung jawaban Partai Amanat Nasional telah melakukan program kerja pendidikan politik terhadap masyarakat, dimana ada bukti tertulis yang di laksanakan partai politik, dengan ada bukti tersebut Partai Amanat Nasional telah menjalankan tugas fungsi partai sebagai tempat pendidikan politik.

Faktor penentu keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat kebijakan Partai Amanat Nasional

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

dalam advokasi pendidikan politik terhadap masyarakat, merupakan suatu bentuk keberhasilan serta tantangan yang dihadapi oleh Partai Amanat Nasional dalam kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat di kabupaten langkat. Adapun keberhasilan kebijakan advokasi pendidikan politik Partai Amanat Nasional yaitu tamu kader, meningkatnya pengetahuan masyarakat pentingnya politik. Sedangkan faktor yang menghambat kebijakan advokasi pendidikan politik, kurangnya waktu pendidikan politik, kurangnya dana partai politik dalam melakukan pendidikan, serta wilayah yang luas dan transportasi yang kurang memadai.

REFERENSI

- Abdullah, M. Idi. Ed. & Hj Safarina HD, M. Pd., M. Si (2011), *Sosiologi pendidikan individu, masyarakat, dan pendidikan*. Depok : Rajawali Pers. Pt. Raja Grafindo Persada Depok
- Adiwidjaja Ignatius dan setyawan Dodi (2016) Kebijakan Partai Politik Dan Strategi Komunikasi Untuk Memikat Pemilihan Pemula Pada Pilkada Kabupaten Malang, Vol 6, no. 1, 2016, Program Studi Adminitrasi Negara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (Di akses pada tanggal 27 oktober 2022. Pukul 11.26)
- Handoyo, Eko. & puji Lestari, S. Pd., M.Si. (2017), *Pendidikan Politik*. Yogyakarta. Pohon Cahaya (UNNES)
- Hamid, Farhan Ahmad (2008), *Partai Politik Lokal di Aceh*. Kemitraan partnership
- Junaedi Dadi Iskandar (2014) Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergulatan Politik Provinsi Jawa Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi Bandung (Di akses pada tanggal 27 oktober 2022. Pukul 20.21)
- Mahardhani, Januar Ardhana. (2018), *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media
- Miriam, Budiardjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. Pt Gramedia Pustaka Utama
- Musdah Erwin (2013) Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman, Government: Ilmu Pemerintahan, Vol.6 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Di akses pada tanggal 28 oktober 2022. Pukul 14.14)
- Ridha, Muhammad Suaib. (2016), *Pengantar kebijakan publik*. Calpulis
- Riwanto, Agus (2016), *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta. Thafa Media.
- Salam Rudi Sinaga, S.sos.M.Si (2013), *Pengantar ilmu politik*. Yogyakarta : Graha ilmu
- Setiadi, M Elly & Usman Koip (2013), *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Panadamedia Group
- Siti Hidayati Amal, "Penelitian yang Berperspektif Perempuan", T.O. Ihromi (Penyunting), 1995, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Subakti Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suharto Edi, Ph.D (2014), *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta bandunhg
- Suhardi. Nasution, M.A. & Kusmanto, H (2019) Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 344-354.
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu002.pdf> (Di akses pada tanggal 22 september 2022. Pukul 20.38)
- Valerie, Miller and Covey Jane (2005), *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id